

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adegustara, Frenadin, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar, Universitas Andalas, Padang.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia–Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib, 2013, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Makasar.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofuri, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharmisi, 1992, *Prosedur Penelitian* , Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dianata, I made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Denpasar.
- Finer, Herman, 1962, *The Major of Governments of Modern Europe*, Harper and Row, Publisher, New York, Envasten, and London.
- HS, Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi Dan Tesis*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huijbers, Heo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta.

Indroharto, *usaha Memahami Hak Asasi Manusia Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.

Iver, Mac, 1950, *The Modern State*, Oxford University Press, London, Geoffrey Cumberlege.

Jaim, M.P 1997. "*Administrative Law of Malaysia and Singapore*", Malayan Journal, Third Edition.

Kelsen, Hans, 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung.

Kelsen, Hans, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Kranenburg, R. dan W.G. Vegting, 1958. *Inleiding in Het Nederland Administratief Recht*, terjemahan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.

Lexy, J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

M. Hadjon, Phillipus, 1986, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya.

M. Manullang, E. Fernando 2016, *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum, Kencana*, Jakarta.

- Marbun, S.F dan Moh.Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Martokusumo, Sudikno dan A.Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan DI Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sugitario, eko dan Tjondro Tirtamulia, 2012. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Brilian Internasional, Surabaya.
- Syafrudin, Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justicia IV, (Bandung :Universitas Parahyangan).
- Thong Kie, Tan, 2007, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan 3, Erlangga, Jakarta.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuslim, 2014. *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Nomor : W3-34-HM.07.01 Tahun 2017 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Nomor W3-25-HM.07.01 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Padang.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-43.HM.07.01.Tahun 2017 Tanggal 13 September Tahun 2017 tentang pemberhentian anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris masa jabatan tahun 2014 samapai dengan 2017 dan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris masa jabatan 2017 sampai dengan tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat

C. Website

<https://kbbi.web.id/perintah>, diakses pada Tanggal 17 Desember 2017 Pukul 23.00 Wib.

www.habibadjie.com, diakses pada tanggal 20 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB.

<http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.org> (diakses pada tanggal 10 Maret 2018) Pukul 20.00 Wib.

D. Kamus

Campbell Black, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, (Amerika Serikat : West Publishing Co.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

UNIVERSITAS ANDALAS
Indonesi, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

E. Tesis dan Jurnal

Amrani Amrana Rusli, 2013, *Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Terkait Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013

Mardiyah, 2017, *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

Ria Indriana, 2015, *Pemberhentian Notaris Sehubungan Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Di Kota Padang*, Tesis, Program Studi Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Jan Michiel Otto, Suzanne Stoter, Julia Arnscheidt and Wim Oosterveld, *Legislative Theory to Improve Law and Development Projects*, dalam jurnal Regel Mat vol. 2004/4